

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM PNPM TERHADAP
PEMBERDAYAAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) DITINJAU DARI PENDEKATAN
MASLAHAH**



Disusun Oleh:

HAYATUL KHUSNA

NIM. 140602017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hayatul Khusna

NIM : 140602017

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Yang Menyatakan



Hayatul Khusna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

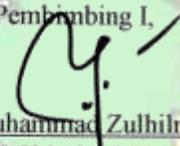
**Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau dari
Pendekatan Masalah**

Disusun Oleh:

Hayatul Khusna
NIM: 140602017

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,


Ana Fitria, SE, M.Sc
NIDN:2005099002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Hayatul Khusna

NIM: 140602017

Dengan Judul:

**Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari
Pendekatan Masalah**

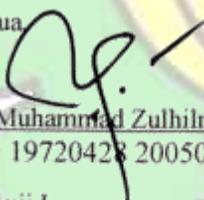
Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juli 2018
26 Syawal 1349 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

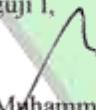
Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

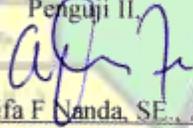
Sekretaris


Ana Fitria, SE, M.Sc
NIDN:2005099002

Penguji I,

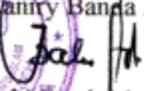

Dr. Muhammad Adnan, S.Ag., MA
NIP. 19720428 199903 1 005

Penguji II,


T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIDN. 2022118501

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hayatul Khusna
NIM : 140602017
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Hayatul.khusna54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau dari
Pendekatan Masalah**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Juli 2018

Mengetahui,

Penulis

Hayatul Khusna

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A

NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II

Ana Fitria, SE, M.Sc

NIDN:2005099002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” - (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

“Banyak dari pesona keyakinan hilang dalam proses akan tetapi keyakinan yang baru segera mendatangi, hingga akhirnya muncul keyakinan bahwa kehidupan tidak bisa terlepas dari keyakinan”

-Hayatul Khusna

Kupersembahkan ini untukmu kedua orang tuaku,

Semoga sarjanaku bisa membawa pahala bagimu

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini dengan judul “Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau dari Pendekatan Masalah”. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Ariffin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A dan Ana Fitria, SE, M.Sc selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, motivasi serta arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si. dan T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc Penguji I dan Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., M.A selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah, Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada kedua orang tercinta, ayahanda Ramli yacob dan ibunda Murni Hanafiah yang selalu memberikan kasih sayang ,do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir, yang tersayang Sudirman, Zahrul Putra, Isra Adifia, yul Afzahnur A,Md.

Ikhsan Jonizar yang sudah banyak memberikan semangat kepada penulis.

8. Kepada sahabat Chairunnas, Reza, Rama, Ghufuran, Riski, Ita, Mai, Nanda yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 Juli 2018
Penulis,

Hayatul Khusna

TRANSLITERASI A-RAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اِوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hayatul Khusna
NIM : 140602017
Fakultas/ Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam (SPP) Ditinjau dari Pendekatan Masalah
Tanggal Sidang : 10 Juli 2018
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi.MA
Pembimbing II : Ana Fitria SE, M.Sc

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak modal PNPM terhadap anggota SPP dan peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kegiatan kerja Di desa Gampong Blang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan objek yang diteliti dampak program PNPM terhadap anggota SPP di desa Gampong Blang dengan data yang di peroleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan modal PNPM-MP terhadap dana SPP sesuai dengan konteks Islam, dengan pemberian modal PNPM anggota SPP mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.

Kata Kunci: *PNPM SPP, Masalah, Kesejahteraan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	15
2.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2 Pembangunan pertumbuhan ekonomi masyarakat ..	18
2.2.1 Pembangunan Ekonomi	18
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	20
2.3 PNPM dalam Pembangunan	
Dan Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3.1 Latar Belakang PNPM	24
2.3.2 Program PNPM.....	26
2.3.3 Prinsip Dasar PNPM.....	34
2.3.4 Legalitas PNPM	36

2.3.5 Jenis Kegiatan Yang Dilarang.....	37
2.3.6 Tujuan PNPM	38
2.4 Taraf Hidup Masyarakat	39
2.4.1 Pengertian Taraf Hidup Masyarakat	39
2.4.2 Taraf Hidup Indeks Pembangunan Manusia ...	40
2.4.3 Kesejahteraan Masyarakat	46
2.4.4 Pendekatan Masalah.....	47
2.5 Pendapatan	52
2.5.1 Pengertian Pendapatan	52
2.5.2 Pendapatan Nasional	54
2.6 Penelitian Terkait	54
2.7 Kerangka Pemikiran	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Lokasi Penelitian	63
3.3 Sumber Data.....	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5 Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Sejarah Singkat PNPM	68
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian	71
4.1.1.1 Usia Responden	71
4.1.1.2 Pekerjaan Responden.....	72
4.1.1.3 Status Kegiatan Kerja Responden	73
4.1.1.4 Jumlah Pembiayaan Responden	74
4.1.1.5 Pendapatan Responden.....	75
4.2 Hasil analisis Dan Pembahasan	76
4.2.1 Penyajian Data	76
4.2.2 Masalah Dalam SPP.....	80
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Program PNPM Terhadap Kegiatan SPP	11
Tabel 2.1 PenelitianTerkait.....	58
Tabel 4.1 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan PNPM Terhadap Kegiatan SPP.....	7
Gambar 4.1 Karakteristik Usia Responden	73
Gambar 4.2 Karakteristik Pekerjaan Responden	74
Gambar 4.5 Karakteristik Status Kegiatan Kerja Responden...	75
Gambar 2.4 Karakteristik Jumlah pembiayaan Responden	76



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian	55
Lampiran 2 Data Responden	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Aresta, 2013). Pembangunan yang dilakukan pemerintah dinilai keberhasilannya apabila tingkat kesejahteraan dari penduduknya telah tercapai. Kesejahteraan akan tercapai apabila dapat mengentaskan kemiskinan. Permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini yaitu terkait dengan tidak tersebarnya secara merata perekonomian yang dilakukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbagai program terus dirancang untuk menurunkan angka penduduk miskin di Indonesia.

Aresta (2013) menyebutkan bahwa salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan suatu usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan. PPK dimulai pada tahun 1998, pada saat terjadinya perubahan yang sangat besar di bidang politik dan krisis keuangan di Indonesia. PPK merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah.

PPK yang selama ini dilaksanakan dinilai berhasil (Purnamasari, 2015). Di antara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan keberhasilan PPK ini pemerintah membentuk produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Sejak tahun 2007, PNPM-MP dibentuk sebagai program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.

Dalam pelaksanaan PNPM-MP, masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan yang paling prioritas di desa tersebut sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. PNPM-MP diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan. Pelaksanaan PNPM-MP berada di bawah binaan Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri (Purnamasari, 2015).

Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Pemerintah menggunakan PNPM-MP sebagai salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan yang dapat didanai melalui program ini diutamakan pada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin, berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat, dan didukung oleh sumber daya yang ada serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, serta program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat pedesaan menurun.

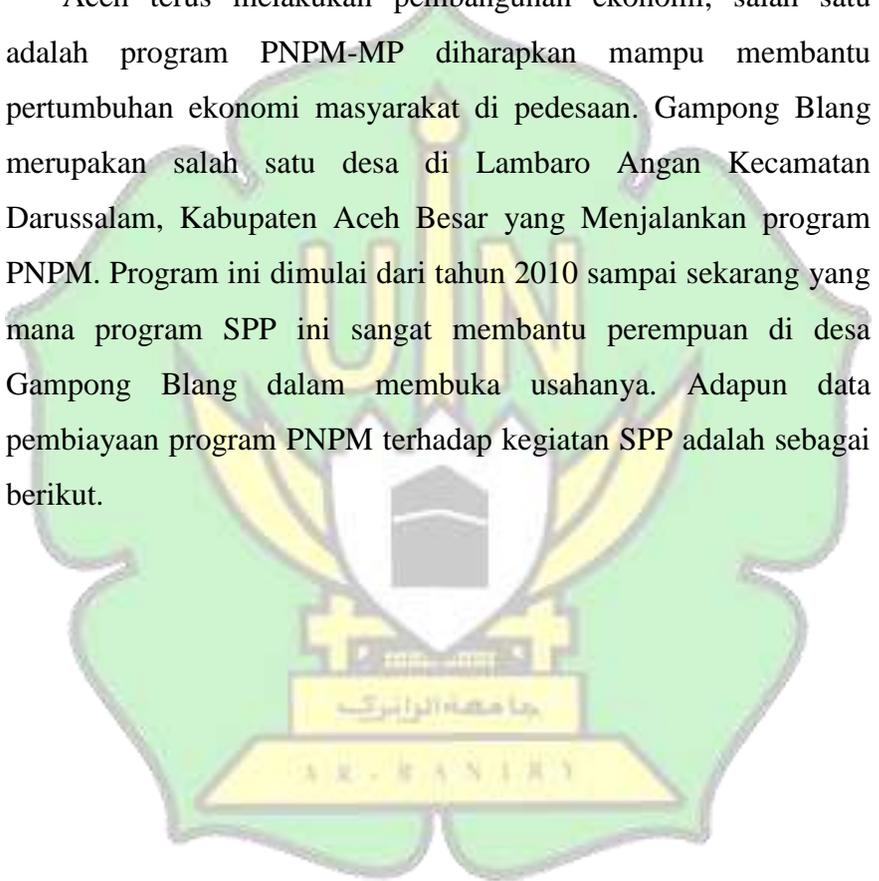
PNPM-MP merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu perjalanan program ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang pesat, khususnya terkait lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MP.

Dalam salah satu tujuan khususnya, disebutkan bahwa PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pelestarian pembangunan. Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, akan tetapi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih berada pada level 10,64 persen dari jumlah total penduduk Indonesia, dimana angka ini belum terlihat kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya (10,86%) (BPS, 2017). Hal tersebut mengindikasikan bahwa program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum bekerja dengan optimal, termasuk program PNPM-MP. Salah satu penyebabnya adalah tidak efektifnya penyaluran dana; dana yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif, digunakan untuk keperluan konsumtif oleh penerimanya.

Salah satu jenis kegiatan PNPM-MP ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang sering disebut dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM-MP untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Secara umum kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam yang semua anggotanya adalah perempuan. Wanita juga sangat berperan penting dalam hal pembangunan dengan mengembangkan kreativitas mereka dalam bidang masing –

masing salah satunya dengan menggunakan produk SPP sebagai modal dalam mengembangkan bakat mereka dengan membuka usaha dan lainnya, terutama untuk membantu suami dalam hal ekonomi keluarga.

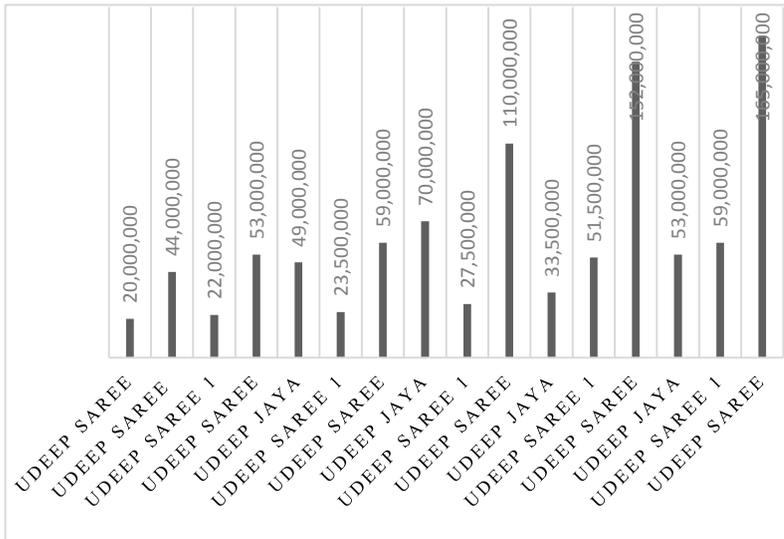
Aceh terus melakukan pembangunan ekonomi, salah satu adalah program PNPM-MP diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan. Gampong Blang merupakan salah satu desa di Lambaro Angan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar yang menjalankan program PNPM. Program ini dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang yang mana program SPP ini sangat membantu perempuan di desa Gampong Blang dalam membuka usahanya. Adapun data pembiayaan program PNPM terhadap kegiatan SPP adalah sebagai berikut.



Tabel 1.1
Pembiayaan Program PNPM-MP Terhadap Kegiatan
SPP (Rupiah)

Gampong Blang			
No	Nama Kelompok	Jumlah Dana	Tahun
1	Udeep Saree	Rp 20,000,000	2010
2	Udeep Saree	Rp 44,000,000	2011
3	Udeep Saree 1	Rp 22,000,000	2012
4	Udeep Saree	Rp 53,000,000	2012
5	Udeep Jaya	Rp 49,000,000	2012
6	Udeep Saree 1	Rp 23,500,000	2013
7	Udeep Saree	Rp 59,000,000	2014
8	Udeep Jaya	Rp 70,000,000	2014
9	Udeep Saree 1	Rp 27,500,000	2014
10	Udeep Saree	Rp 110,000,000	2015
11	Udeep Jaya	Rp 33,500,000	2016
12	Udeep saree 1	Rp 51,500,000	2015
13	Udeep Saree	Rp 152,000,000	2016
14	Udeep Jaya	Rp 53,000,000	2016
15	Udeep Saree 1	Rp 59,000,000	2017
16	Udeep Saree	Rp 165,000,000	2017

Sumber: Kantor PNPM Kecamatan Darussalam (2018)



Sumber: Data kantor PNPM 2018

Grafik 1.1 Pembiayaan Program PNPM-MP Terhadap Kegiatan SPP (Rupiah)

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 terlihat adanya pengaruh positif dari setiap modal yang diberikan, dana program PNPM yang diberikan meningkat setiap tahapnya bagi masing-masing kelompok itu dikarenakan adanya perkembangan pada kelompok tersebut, sedangkan pada kelompok yang modalnya tidak meningkat pada tahap selanjutnya berarti ada masalah pada kelompok tersebut misalnya kredit macet.

Ekonomi Islam adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam sangat berpengaruh dengan adanya inovasi dalam membangun dan mengembangkannya. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi slam, Berbagai perkembangan produk dan

inovasi ekonomi islam memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk itu, pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah patokan yang sangat penting (Qorib & Harahap, 2016). Masalah mursalah merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan untuk penetapan hukum tersebut. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam Alqur'an maupun hadis mengandung masalah sehingga tidak berlebihan.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan diartikan sebagai konsep masalah. Masalah merupakan kesejahteraan umum yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting karena masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan demikian, masalah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, adanya program PNPM-MP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga PNPM-MP dianggap mampu memberikan masalah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan (Purnamasari, 2015).

Adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

Purnamasari (2010) dalam penelitiannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional Terhadap Peningkatan Taraf Hidup di desa Sangatta Kabupaten Kutai Timur menemukan bahwa PNPM mandiri mempunyai hubungan kuat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan dari hasil uji hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara program pemerintah PNPM mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan SPP. Lebih lanjut, Nurmantoro (2011) dalam penelitiannya tentang Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kecamatan Ngaryoso, Kabupaten Karanganyar menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dimana dalam penelitian ini ada pengaruh positif antara peningkatan pendapatan, jumlah produksi dan tenaga kerja meningkat setelah mendapat bantuan modal PNPM.

Sebaliknya, Aresta (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Bantuan Modal Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bayuurip menemukan bahwa pengaruh modal bantuan PNPM perdesaan terhadap perkembangan usaha dari program SPP menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan bantuan modal terhadap perkembangan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda-beda dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak PNPM-MP tersebut pada kelompok SPP di Gampong Blang. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “**Analisis Dampak Program PNPM-MP terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau dari Pendekatan Masalah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang?
2. Bagaimana dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap perkembangan usaha anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang?
3. Bagaimana dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap kegiatan kerja anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang.
2. Untuk mengetahui dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap perkembangan usaha anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang.

3. Untuk mengetahui dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap kegiatan kerja anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan PNPM-MP yaitu terkait tentang peningkatan ekonomi masyarakat desa ditinjau dari sisi masalah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat mengenai peranan PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kegiatan kerja.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah sebagai tambahan perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama mengenai peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pendekatan masalah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang potensi-potensi dalam masyarakat yang belum tergal, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan melalui program PNPM-MP.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori program SPP dan penjelasan pendapatan Anggota SPP, Masalah dalam SPP, penelitian terkait dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas sejarah singkat PNPM SPP, deskripsi obyek penelitian, usia responden, pekerjaan, status kegiatan kerja, jumlah pembiayaan dan pendapatan responden.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang serta layanan yang dibutuhkan dan partisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat miskin (Putra, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan untuk memandirikan masyarakat lewat potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling berkaitan, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan sebagai pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan, jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilihan faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji dan upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh.

informasi dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik, yang lebih penting adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaaan masyarakat di bidang ekonomi sebab pemahaman ini akan lebih produktif memformulasikan konsep, pendekatan dan bentuk operasional pemberdayan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal (Rachmawati, 2011).

Adapun salah satu masalah yang dihadapi masyarakat lemah adalah dalam hal memperoleh modal, dalam dunia pasar uang masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro dan kecil terus didorong dalam meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh lembaga keuangan sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan yang posisinya adalah sebagai perantara seharusnya berbagi risiko dengan *borrowers* dengan memberikan informasi kepada *borrowers* dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat lemah dan pengusaha kecil di perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif dan atas perlakuan yang tidak adil itu masyarakat tidak memiliki

kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan (Rachmawati, 2011).

2.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial. Apabila kita sudah memiliki kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer (*knowledge*) kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang hebat maka kita akan dapat menguatkan *knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok yang produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin (*sustainability*) dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build the trust*). Rachmawati (2011) memaparkan konsep pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang dilaksanakan oleh rakyat dan bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kemampuan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah suatu usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kemandirian. Adapun proses perubahan struktur meliputi: (1) pengalokasian sumber daya, (2) penguatan kelembagaan, (3) penguasaan teknologi, dan (4) pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup dengan hanya peningkatan produktivitas saja, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan. Akan tetapi harus dijamin dengan adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
 - (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (modal) khususnya,
 - (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*,
 - (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan,
 - (4) penguatan industri kecil,
 - (5) mendorong munculnya wirausaha baru, dan
 - (6) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
 - (1) peningkatan akses bantuan modal usaha,
 - (2) peningkatan akses pengembangan SDM,
 - (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

2.2.1. Pembangunan Ekonomi

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak kaum merkantilis sampai Adam Smith, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah terbelakang. Perhatian mereka dalam masalah pembangunan lebih didorong oleh gelombang kebangkitan politik yang melanda bangsa Asia dan Afrika sesudah perang dunia ke-II. Keinginan negara ini untuk melancarkan pembangunan ekonomi yang cepat dibarengi

dengan kesadaran bangsa-bangsa di negara maju bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran dimana pun. Bagi mereka pembangunan ekonomi negara-negara terbelakang juga memiliki nilai ekspor terutama dalam upaya menghindari stagnasi jangka panjang, negara-negara kaya akan memerlukan laju perkembangan yang senantiasa meningkat dan itu harus diikuti dengan pasar (outlet) demi pemanfaatan stok modal mereka yang selalu tumbuh pesat. Di samping itu juga negara miskin memerlukan percepatan laju pembangunan guna meningkatkan kemampuan ekspor dalam rangka mengelakkan defisit pada neraca pembangunan (Jhingan, 2012).

Hambatan pembangunan ekonomi adalah kelangkaan modal. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal di suatu negara. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik serta menggunakan peralatan modal dan metode produksi yang telah usang. Lapangan usaha hanya bidang pertanian pangan, tidak *mobile* dan tidak banyak bersentuhan dengan sektor pasar perekonomian. Dengan begitu produktivitas marginalnya menjadi sangat rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan nyata rendah, lalu tabungan pun rendah, investasi rendah, dan tingkat pembentukan modal rendah pula. Tingkat konsumsi sudah begitu rendah sehingga tidak mungkin lagi dikurangi untuk meningkatkan cadangan modal (Jhingan, 2012). Itulah sebabnya mengapa jutaan petani masih menggunakan peralatan modal yang

usang dan ketinggalan zaman, walaupun ada sedikit uang yang ditabung, uang itu disimpan dalam bentuk mata uang atau dipergunakan untuk membeli emas dan permata. Kecenderungan menyimpan uang seperti ini merupakan akibat dari ketiadaan fasilitas perbankan di daerah pedesaan. Tidak mengherankan bahwa pembentukan modal di negara berkembang sangat rendah.

Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri (Jhingan, 2012).

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara, Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (*production –possibility frontier /PPF*) bangsa bergeser keluar (Nordhaus, 2011).

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB rill. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Nanga, 2005). Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di

berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut:

1. Teori Klasik: Menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Teori Schumpeter: Menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori Harrod-Domar: Mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekan kan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan

menggunakan produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita (Nanga, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) pada tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat regional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat dimaknai adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan PDRB.

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (Nanga, 2005). Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat regional yang disajikan secara berkala dapat diketahui: tingkat pertumbuhan ekonomi, gambaran struktur perekonomian, perkembangan pendapat perkapita, tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat inflasi dan deflasi.

2.3 Peran PNPM Dalam Pembangunan Dan Petumbuhan Ekonomi

2.3.1. Latar Belakang PNPM

PNPM pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin kelompok perempuan dan berkomunitas kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat.

Usulan kegiatan yang dapat didanai oleh PNPM mandiri pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi: (1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, (4) penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan

sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan (Negeri, 2008).

Prasarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. PNPM mandiri pedesaan tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan (*negative list*) pelarangan ini didasarkan atas komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak dan lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat umum, terutama masyarakat miskin.

Secara umum PNPM dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan umum dan peningkatan lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Selain itu PNPM dapat meningkatkan sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

2.3.2 Program PNPM

A. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan prasarana dilakukan dengan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat namun memprioritaskan bagi rumah tangga miskin :

- 1) Pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan identifikasi dan pendaftaran calon tenaga kerja.
- 2) Pencatatan rumah tangga miskin yang aktif dalam kegiatan prasarana dan pendapatan yang diterimadihitug berdasar jumlah Hari Orang Kerja (HOK) dan jumlah angkatan kerja.
- 3) Pengutamakan pengguna bahan lokal, kemungkinan kualitas bahan lokal yang ada tidak sebgus bahan dari luar tetapi masih memenuhi standar teknis maka bahan lokal tersebut perlu dimanfaatkan.

B. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Prasarana

Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan prasarana dan sarana bagi pelaku PNPM mandiri pedesaan, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (jakarta, 2008):

1. Metode perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus difokuskan untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat.

2. Usulan didasarkan pada pandangan masa depan yang dihasilkan secara musyawarah dengan mengutamakan manfaat bagi rumah tangga miskin.
3. Kegiatan yang dibangun tidak boleh ada dampak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
4. Sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia setempat.
5. Tenaga kerja yang ikut partisipasi dalam kegiatan dibayar insentif secara penuh.

C. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

1) Tahap perencanaan /desain

Pada tahap ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, KPMD dan masyarakat yang berminat, meliputi: cara melakukan survei, perencanaan dan penyusunan RAB.

2) Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat pekerjaan, meliputi: cara melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis yang ditentukan (*trial*).

3) Tahap pemeliharaan

Pada tahap ini dilakukan penguatan kepada tim pengelola pemeliharaan prasarana (TP3) tentang organisasi dan teknis pemeliharaan.

D. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, unruk menghitung RAB dibutuhkan:

1. Hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan
2. Harga bahan, tenaga, dan alat (baik beli atau sewa) yang didapat dari hasil survei.
3. Biaya umum tiap desa (bukan tiap kegiatan) adalah untuk honor TPK dan administrasi
besarnya biaya tersebut setiap desa maksimal sebesar 3% dari aloksi dana kegiatan prasarana (Negeri, 2008) .

Nili RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan alat dengan harga hasil survei, kemudian ditambah dengan biaya umum. Hasil desain dan RAB disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mengerti tentang pekerjaan bagaimana desain usulan mereka dan berapa besar dana yang dibutuhkan.

E. Simpan Pinjam Perempuan

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan yang memperhatikan hubungan atau relasi antara laki laki dan perempuan. Pandangan ini

diperkuat dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Semakin tinggi tingkat penghargaan terhadap Gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

SPP adalah kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam bidang pengembangan ekonomi yang dikhususkan bagi perempuan. Dalam program SPP tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan pada sektor publik dengan membuka peluang usaha. Sesuai dengan dana pinjaman diberikan kepada perempuan yang bersedia mengikuti pelaksanaan program, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membuka berbagai usaha berdasarkan keinginan peserta program. Persyaratan untuk menjadi peserta program ini yaitu (1) perempuan yang telah menikah, (2) mendapat izin suami dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, (3) bagi perempuan dengan status janda, melampirkan surat keterangan, adapun prosedur pengajuan dana pinjaman yaitu: (1) peserta tergabung menjadi kelompok dengan anggota maksimal 10 orang, (2) setiap peserta

mengajukan dana pinjaman dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setempat, (3) dana pinjaman diberikan kepada setiap kelompok setelah proposal disetujui, (4) dana pinjaman selanjutnya dibagikan kepada setiap anggota individu, (5) setiap anggota kelompok wajib membayar angsuran per bulan dengan jumlah yang telah ditentukan besarnya. (Lestari, 2013)

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan tersebut itu tidak terlepas dari dukungan laki-laki yang turut mendukung dalam aktivitas publik perempuan termasuk mempengaruhi partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam program SPP. Hasil keluaran atau pengaruh dari pelaksanaan SPP diharapkan berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Secara khusus program ini bertujuan untuk: (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, (3) Mendorong penguatan kelembagaan

simpan pinjam oleh kaum perempuan. Adapun ketentuan dasar adalah sebagai berikut:

- a) *Kemudahan*, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b) *Terlembagakan*, artinya dana kegiatan spp disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c) *Keberdayaan*, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d) *Pengembangan*, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e) *Akuntabilitas*, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (jakarta, 2008).

Di dalam Pedoman Umum PNPM disebutkan bahwa tujuan umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

F. Proses Pencairan Dana SPP

Adapun proses pencairan dana yang diajukan oleh calon peminjam :

1. Pembuatan proposal yang diajukan kepada UPK, setelah itu UPK menganalisa kelayakan proposalnya dan dianalisa kelayakan proposal.
2. Tim verifikasi yang turun langsung kelapangan untuk wawancara langsung dengan peminjam. Dari hasil verifikasi ada penilaian terhadap usaha-usaha anggota calon peminjam bahwa benar ada usaha atau tidak.

3. Setelah itu tim verifikasi menilai siapa yang berhak diberikan pendanaan dan dana yang diberikan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
4. Tim verifikasi melakukan rapat dengan tim pendanaan mengenai kelompok yang mengajukan pembiayaan sebesar 50 juta, nantinya akan di pertimbangkan dana yang diajukan layak diberikan dana.
5. Hasil penilaian dan rekom dari tim verifikasi bahwa ada kemungkinan yang mengajukan tidak bisa diberikan modal dikarenakan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jumlah dana yang diajukan.
6. Rapat dengan tim pendanaan, kemudian memberikan laporan hasil rapat kepada kasi PPMG karena kasi tersebut yang menandatangani buku rekening SPP supaya dana SPP cair, ada 4 orang yang menandatangani ,pertama kasi dari kantor camat, ketua BKAD, wakil masyarakat, BPPK.
7. Penarikan uang di bank dan langsung terjun kelapangan untuk menyalurkan pinjaman, dan pinjaman tidak diberikan secara pribadi akan tetapi kepada kelompok dan dicantumkan SPK (surat perjanjian kredit) dimana terdapat tanda tangan Pak Geuchik Gampong mengetahui camat dan SPK itu di tanda tangani oleh 5 orang yaitu ketua UPK, ketua kelompok, kasi PPMG, Geuchik Gampong yang bersangkutan dan Camat Kecamatan Darussalam .

Pemberian dana misalnya bulan 1, kantor PNPM akan memberikan senggang waktu 1 bulan bagi peminjam untuk mengumpulkan uang dalam usahanya, berarti misalnya calon peminjam mengajukan proposal nya bulan 1 maka pencairannya itu berdasarkan antrian, bisa jadi dana akan cair 1- 2 bulan .

Dalam pinjaman SPP tidak ada bunga melainkan bagi hasil, mereka menyebutnya dengan jasa ,dimana jasa sebesar 10% pertahun dibagi pebulan dalam 1 bulannya itu 0,86%. setelah jasa itu terkumpul diakhir tahun selanjutnya diadakan rapat dengan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa) ,BPPK, UPK. Kemudian jasa itu akan dibagikan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dari 29 desa di kecamatan darussalam, dimana satu desa mewakili 5 orang, PNPM memberikan jasa itu kepada RTM berupa uang dan paket sembako.

2.3.3 Prinsip Dasar PNPM

Sesuai dengan pedoman umum PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Prinsip-Prinsip tersebut meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap

upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.

2. Otonomi, pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.
3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi, Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu maupun barang.
6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga

dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7. Demokratis, Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
8. Transparansi dan Akuntabel, Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
9. Prioritas, Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
10. Keberlanjutan, pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya (Negeri, 2008).

2.3.4. Legalitas PNPM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 tentang penyusunan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran lanjutan program/kegiatan nasional

pemberdayaan masyarakat mandiri tahun anggaran 2012 dengan sumber dana dari sisa anggaran PNPM-MP tahun anggaran 2011.

2.3.5 Jenis Kegiatan yang Dilarang (*Negative List*)

Adapun jenis kegiatan yang dilarang dalam dalam PNPM adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah
3. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain)
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
5. Pembiayaan gaji pegawai negeri
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut

9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
10. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
11. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha)
12. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
13. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik (jakarta, 2008).

2.3.6 Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan yang ingin dicapai didalam pelaksanaan program PNPM Mandiri ini adalah

- a. Tujuan Umum: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- b. Tujuan Khusus yaitu:
 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Negeri, 2008)

2.4. Taraf Hidup Masyarakat

2.4.1. Pengertian Taraf Hidup Masyarakat

Kata ‘taraf’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti mutu atau kualitas jadi dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu

masyarakat (Purnamasari, 2015). Taraf hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada yang membedakan taraf hidup bentuk primer maupun bentuk sekunder. Taraf hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan (Fargomeli, 2014). Sedangkan taraf hidup sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat dan perabot, ukuran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah melalui kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder yakni melalui pendapatan. Jadi taraf hidup masyarakat diukur dari tingkat kesejahteraan, kondisi sejahtera dilihat dari terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

2.4.2. Taraf Hidup Indeks Pembangunan Manusia

Dalam *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya (Subandi, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli.

Sebagaimana dikutip dari UNDP sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan

pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan, diantaranya pilihan untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2012). Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pertumbuhan ekonomi

merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. Produktivitas merupakan salah satu sumber daya bagi peningkatan ekonomi dasar dari peningkatan standar hidup karena dengan peningkatan produktivitas, dapat pula ditingkatkan keuntungan yang dicapai. Begitu pentingnya peranan produktivitas dalam pembangunan nasional sehingga banyak yang menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kualitas, bekerja efisien dan efektif sehingga mampu menciptakan produktivitas.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian mengatakan: produktivitas masalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Jadi dapat disimpulkan pengertian produktivitas kerja adalah jumlah hasil yang dicapai dari sarana dan prasarana yang tersedia (output) , dimana faktor produksi manusia yang dijadikan faktor pengukur (input) produktivitas dalam menentukan hasil yang dicapai dari jangka waktu tertentu. (Al-Maqassary, 2013)

b. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Pemerataan

pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan (Sugiarto, 2017)

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Sumber daya fisik, manusia dan lingkungan harus terus diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk dan arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Menurut UNDP, dalam IPM terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan daya beli.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menetapkan suatu formula yang kompleks, yang dibagi menjadi 3 kelompok (Subandi, 2016):

1. Negara dengan pembangunan manusia rendah (*low human development*) bila nilai *Human Development Index* (HDI) berkisar antara 0,0 hingga 0,59
2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,78
3. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya

dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

2.4.3. Kesejahteraan Masyarakat

BKKBN (1993) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/ taraf hidup masyarakat, terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu:

1. Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga , interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi transportasi, dan sebagainya.
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial, psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat

baik ke dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif, dalam kegiatan sosial masyarakat.

5. Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

2.4.4. Masalah

Maslahah dapat diartikan baik atau positif, masalah dapat juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Adapun secara terminologi masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut maka dinamakan masalah. Masalah adalah sasaran pokok dari sebuah hukum (maqasid syari'ah) substansi Al- Maqashid Syari'ah adalah kemaslahatan (Harun, 2011).

Dipandang sebagai indikator dari falah masalah adalah hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat menghadirkan berkah, suatu kegiatan yang tidak dapat menimbulkan berkah maka tidak disebut sebagai masalah. Sementara berkah adalah suatu kegiatan

atau aktivitas yang menghasilkan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Indikator adanya kebaikan yaitu jika suatu perbuatan menghasilkan pahala atau tidak. Suatu kegiatan yang tidak menghasilkan pahala dan justru menghasilkan dosa yang dianggap memperoleh pahala negatif. Karenanya berkah yang diperoleh adalah berkah negatif, maka masalah pun menjadi negatif sehingga justru menjadi mafsadah yang menjauhkan agen tersebut dari tujuan hidup falah.

Maslahah juga memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata al-‘Âlim, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majâzî* misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan memperoleh kemanfaatan. Misalnya bercocok tanam dan perdagangan. Dengan melakukan semua kegiatan ini dapat memperoleh manfaat yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *masalahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalahah* secara *majâzî* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma‘âjim allugah*, seperti kamus *al-Muhîd* dan *al-Misbâh al-Munîr*.

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *masalahah* secara *haqîqî* adalah *masalahah* yang secara *lafaz* memiliki makna *almanfa‘ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majâzî*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu‘jam al-Wasît*, bahwa

masalah as-salah wa an-naf'. Kalau *saluha*, kata al-‘Âlim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munâsib*). Berdasarkan makna ini, al-‘Âlim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *masalah* dalam pengertian *majâzî* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *masalah* dalam pengertian *haqîqî* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini al-‘Âlim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana (Rosyadi, 2013).

Setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *masalah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *masalah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).

Mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu, sedangkan dari pengertian secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan *syara'* yaitu menjaga Agama (*din*), Jiwa (*nafs*), Akal (*akal*), Kehormatan dan Keturunan (*arad*) dan Harta (*mal*). Artinya, jika

seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara*” dikatakan *masalahah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara*” tersebut juga dinamakan *masalahah*. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara*” di atas maka dikatakan *masalahah*.

2.4.4.1 Macam-Macam Masalahah

1. Masalahah Berdasarkan Kualitas Dan Kepentingan Masalahat
Para ulama membagi masalahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu
 - (1) *al-mashlahah al-darûriyyah*, yaitu kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan
 - (2) *al-Mashlahah al-hâjjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *hajjiyat* (sekunder) menjadi salah satu

lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi dan

(3) *almashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

2. Maslahat Berdasarkan Kandungannya

Berdasarkan kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, yaitu *al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyah* dan *al-maslahah al-khassah* atau *almaslahah al-juz'iyah*. *Al-Maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Al-maslahah al-khazzah* atau *al-maslahah al-juz'iyah* adalah maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*. *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi.

3. Maslahat Berdasarkan Perubahan Maslahat

Al-maslahah al-sabitah, maslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Masalah muamalah dan adat kebiasaan seperti antara satu daerah dan daerah lainnya yang dalam kaitannya untuk

memberikan gambaran batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan kemaslahatan yang tidak berubah

4. Masalah Berdasarkan Konteks Legalitas Formal

Masalah ini terdiri atas *al-maslahah almu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-maskut'anha*. *Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah masalah yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. *Al-maslahah almulghah* atau masalah yang ditolak adalah masalah yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. *Al-maslahah al-maskut'anha*, yaitu masalah yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. (ariasty, 2015)

2.5 Pendapatan

2.5.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata dasar "dapat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang

disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu (Christine & dkk, 2016).

Setidaknya terdapat dua disiplin ilmu yang memiliki penafsiran tersendiri mengenai pengertian pendapatan. Disiplin ilmu yang pertama adalah Ilmu Ekonomi sedangkan yang kedua adalah disiplin Ilmu Akuntansi. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Menurut pengertian akuntansi keuangan, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan

kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan dari barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu

2.5.2 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) disuatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi selama satu tahun. konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh *william pretty* dai inggris ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern, sebab menurut para ahli ekonomi modern konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. menurut mereka, alat utama pengukur kegiatan perekonomian alah produk nasional bruto (Gross national product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar.

2.6. Penelitian Terkait

1. Purnamasari (2010) dalam penelitiannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional Terhadap Peningkatan Taraf Hidup di Desa Sangatta Kabupaten Kutai Timur Menemukan bahwa PNPM mandiri mempunyai hubungan kuat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan dari hasil uji hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara program pemerintah PNPM mandiri terhadap

peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP).

2. Hamidi, Jahrizal, dan Susanti (2010) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Program PNPM Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dari penelitiannya Menemukan bahwa bahwa program PNPM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dimana dalam penelitian ini yang mana masyarakat sebelum mengambil modal bergilir pendapatannya sebesar 1.000.000 perbulan meningkat sebesar 1.500.000 perbulan setelah mengambil bantuan modal bergilir dari PNPM untuk menjalankan usahanya dalam meningkatkan pendapatan.

3. Aresta (2013) Dalam penelitiannya tentang Pengaruh Bantuan Modal Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bayuurip Menemukan bahwa pengaruh modal bantuan PNPM perdesaan terhadap perkembangan usaha simpan pinjam perempuan (SPP) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan bantuan modal terhadap perkembangan usaha tersebut.

4. Ningsih (2013) Dalam penelitiannya tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Perdesaan Menemukan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan simpan pinjam khusus perempuan ,sesuai dengan lingkup PNPM mandiri perdesaan khususnya penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan,

realisasinya dengan jalan : musyawarah antar desa sosialisasi, musyawarah desa sosialisasi, pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penggalan gagasan, verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan, penetapan persyaratan, pencairan dana, penerimaan dana dan sistem pembayaran. (2) kendala dalam pelaksanaan program yaitu keterlambatan pembayaran angsuran yang dikarenakan nasabah mengalami keterpurukan dalam usahanya atau mengalami penurunan dalam usahanya dan banyak nasabah tidak menggunakan modal untuk usahanya, (3) langkah yang ditempuh untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu: mengadakan pertemuan sekali setiap bulannya yang membahas masalah pembayaran angsuran setiap bulannya dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

5. Nurmantoro (2011) dalam penelitiannya tentang Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kecamatan Ngaryoso Kabupaten Karanganyar menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dimana dalam penelitian ini ada pengaruh positif antara peningkatan pendapatan, jumlah produksi dan tenaga kerja meningkat setelah mendapat bantuan modal PNPM.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Tahun	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	2010	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Sangatta kabupaten kutai timur	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat	Bahwa Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
2	2010	Pengaruh Program PNPM Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pendapatan	Menemukan Bahwa Program PNPM Memberikan Dampak Positif Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah mengalami peningkatan antara sebelum Dan sesudah

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Tahun	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
3	2013	Pengaruh Bantuan Modal Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bayuurip	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menemukan Bahwa Pengaruh Modal Bantuan PNPM Terhadap Perkembangan Usaha Simpan Pinjam Perempuan Bahwa Tidak Ada Pengaruh Positif dan Signifikan Modal Terhadap Perkembangan Usaha
4	2013	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Pedesaan	Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan program PNPM harus sesuai dengan lingkup SPP), kendala yang terdapat dalam PNPM yaitu Kredit Macet, langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan yaitu dengan adanya pertemuan sekali dalam sebulan.

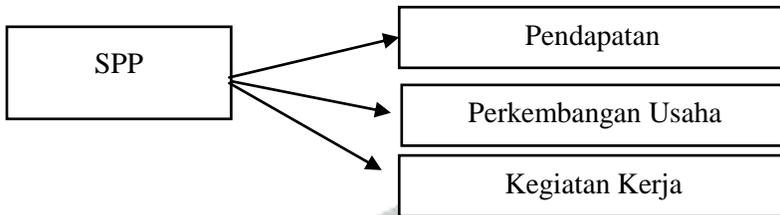
Tabel 2.1- Lanjutan

No	Tahun	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
5	2011	Analisis ekonomi PNPM-MP di kecamatan Ngaryoso kabupaten karanga anyar	Pemberdayaan Masyarakat	Menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan PNPM-MP terhadap pemberdayaan masyarakat dengan adanya pengaruh yang positif

Sumber: Data primer diolah kembali (2018)



2.7 kerangka pemikiran Kemaslahatan Anggota



Kerangka pemikiran merupakan semua kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam sebuah kelompok yang dibentuk, kerangka pemikiran berguna untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga si penulis lebih mudah dan terarah. kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis adalah seperti gambar diatas.

Program yang diteliti oleh penulis adalah PNPM mandiri pedesaan yang salah satu programnya adalah pinjaman dana bergulir atau disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang disalurkan kepada anggota kelompok, sehingga bantuan PNPM mandiri pedesaan ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi anggota kelompok SPP dalam pendapatan, perkembangan usaha, dan kegiatan kerja menjadi lebih produktif dengan adanya bantuan dana SPP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial yang menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (responden) dalam latar alamiah, dengan kata lain penelitian ini berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai dan menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan dengan sebenarnya. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sudaryono, 2017).

3.2 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian adalah Di desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua macam sumber:

- a. Jenis data primer yaitu jenis data yang diperoleh dari lapangan dan melakukan wawancara dengan responden.
- b. Jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kantor PNPM, jurnal yang berkaitan dengan program PNPM khususnya mengenai pendistribusian dana PNPM-MP pada kelompok SPP di desa Gampong Blang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini maka dibutuhkan tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, adapun metode analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencacatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi ini merupakan dasar fundamental dari semua riset atau penelitian. Apapun metode yang dipakai dalam suatu riset, observasi berfungsi sebagai langkah awal dalam memahami penelitian. Observasi sebagai metode kualitatif berfungsi sebagai pencatatan yang sistematis yang terlihat di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas, untuk mengetahui pengaruh program PNPM terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dalam produk simpan pinjam perempuan (SPP).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori Program PNPM khususnya kegiatan simpan pinjam perempuan di desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3.5 Teknik Analisis Data

analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun

suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prihatin, 2015) . Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*) Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan sebuah proses pemilihan dan pemusatan, penyederhanaan hasil data kasar yang terdapat dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh, dan integrative yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

Dikarenakan penelitian ini juga penelitian kuantitatif maka penyajian data yang digunakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi, pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data Penarikan.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat dasar.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Program PNPM

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan suatu usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan. PPK dimulai pada tahun 1998. PPK yang selama ini dilaksanakan dinilai berhasil (Purnamasari, 2015). Di antara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan keberhasilan PPK ini pemerintah membentuk produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sejak tahun 2007, Program PNPM-MP dibentuk sebagai program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dan PNPM di kecamatan Darussalam dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang.

PNPM-MP merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi.

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu perjalanan program ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang pesat, khususnya terkait lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MP. Salah satu jenis kegiatan PNPM-MP ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang sering disebut dengan SPP. Dalam salah satu tujuan khususnya, disebutkan bahwa PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pelestarian pembangunan. Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM-MP untuk memprioritas pemberdayaan perempuan.

Secara umum kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam yang semua anggotanya adalah perempuan. PNPM-MP diharapkan mampu mendorong terbentuknya harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, dan berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui program PNPM-MP ini juga diharapkan nantinya masyarakat mampu belajar mengembangkan usaha yang produktif demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri dan

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lain di sekitar mereka, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat .

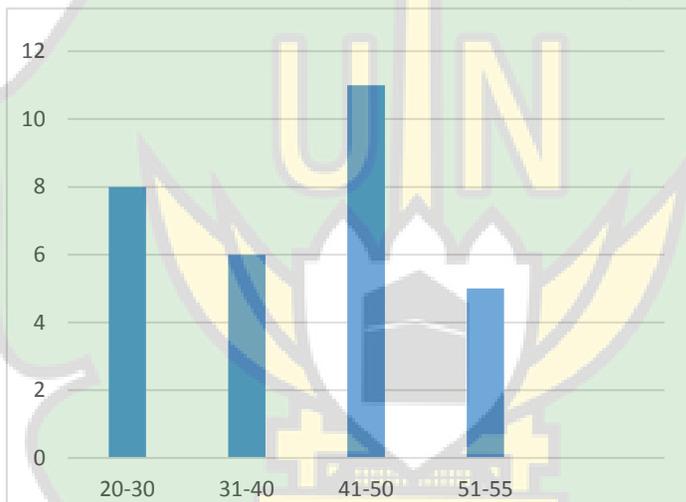
Wanita juga sangat berperan penting dalam hal pembangunan dengan mengembangkan kreativitas mereka dalam bidang masing-masing salah satunya dengan menggunakan produk SPP sebagai modal dalam mengembangkan bakat mereka dengan membuka usaha dan lainnya, kenapa mereka menggunakan produk SPP ini, karena salah satunya untuk membantu suami dalam hal ekonomi keluarga tentunya dalam pengambilan modal ini tidak lain ada dukungan juga dari suami masing-masing.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan diartikan sebagai konsep masalah. Masalah merupakan kesejahteraan umum yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting karena masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan demikian, masalah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, adanya program PNPM-MP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga PNPM-MP dianggap mampu memberikan masalah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

4.1.1 Deskripsi obyek Penelitian

4.1.1.1 Usia Responden

Usia responden merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pekerjaan, karena apabila umur seseorang sudah tidak produktif maka akan berpengaruh terhadap penghasilan yang akan diperoleh akan semakin sedikit. Adapun gambaran usia anggota SPP adalah sebagai berikut:

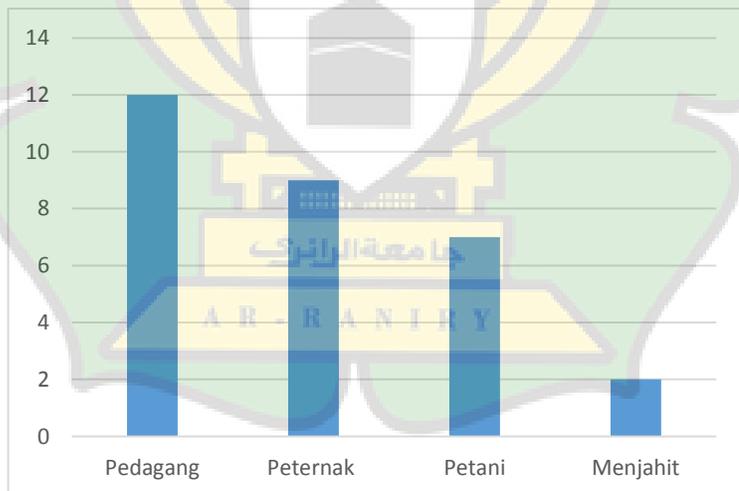


Data diolah:2018

Grafik 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa umur responden pada anggota SPP di Desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar paling banyak anggota terdapat pada usia 41-50 sebanyak 11 Anggota. Dan Responden yang paling sedikit Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa umur responden SPP di Desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar paling banyak anggota terdapat pada usia 41-50 sebanyak 11 Anggota. Dan Responden yang paling sedikit terdapat pada usia 51-55 yaitu berjumlah hanya 5 orang , dan untuk Responden yang usia dari 31-30 tahun terdapat 6 orang dan pada usia dari 20-30 yaitu berjumlah 8 orang.

4.1.1.2 Pekerjaan Responden



Data diolah : 2018

Grafik 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan Responden yang merupakan anggota program SPP yang terbanyak yaitu disektor Pedagang berjumlah 12 orang, sedangkan jenis pekerjaan responden disektor Peternak berjumlah 9 Petani berjumlah 7 orang, dan bidang Menjahit berjumlah 2 orang. Dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak pada bidang usaha adalah pedagang. Karena daerah Lambaro Angan itu merupakan pusat pasar di Kecamatan Darussalam dimana pekerjaan yang sangat mendukung adalah berdagang.

4.1.1.3 Status Kegiatan Kerja Responden



Data diolah:2018

Grafik 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kegiatan Kerja

Jadi dapat dilihat dari grafik diatas bahwa menurut status bekerja sendiri lebih banyak dibandingkan tidak bekerja, jumlah yang bekerja sebanyak 27 orang, dan yang tidak bekerja hanya berjumlah 3 orang karena dia membayar orang lain untuk bekerja.bekerja sendiri lebih banyak kerena Responden lebih ingin

memperoleh hasil pendapatan seutuhnya sendiri, Responden tidak mau mempekerjakan orang karena tidak ingin hasil pendapatannya berkurang unuk membayar orang lain

4.1.1.4 Jumlah Pembiayaan Responden



Data di Olah: 2018

Grafik 4.4
Karakteristik Responden Dalam Pembiayaan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan terbesar Rp 1.000.000– Rp 3.000.000 diperoleh 13 orang anggota spp yang menjadi Responden dan jumlah pembiayaan Rp11.000.000 – 20.000.000 didapatkan sebanyak 9 orang anggota yang menjadi Responden, sedangkan dengan jumlah Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 didapatkan oleh 5 orang anggota dan jumlah pembiayaan Rp 6.000.000- Rp 10.000.000 didapatkan oleh 3 orang anggota.

4.1.1.5 Pendapatan Responden

Tabel 4.1
Pedapatan Sebelum dan Sesudah Responden (Rupiah)

NO	NAMA	PEDAPATAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Raudhah	1000000	3000000
2	Ade Asniar	0	2000000
3	Nurasnita	500000	1000000
4	Nurazizah	150000	600000
5	Rahmi Nurrezeki	1000000	2000000
6	Darmila	1000000	2300000
7	Ainal Mardhiah	700000	1000000
8	Mardiana	1000000	2500000
9	Irawati	400000	1000000
10	Siti Hajar	500000	1000000
11	Idawati	1000000	1500000
12	Misra	5000000	10000000
13	Rosniati	200000	500000
14	Fatimah Syam	1500000	3000000
15	Asnawiyah	700000	1000000
16	Asmawati	1000000	2000000
17	Murni	1000000	1200000
18	Rusniati	500000	1000000
19	Asma	800000	1200000
20	Syaribanun	800000	1000000
21	Radhiah	600000	1000000
22	Rahmaniati	1000000	2000000
23	Ummi Kalsum	9000000	1300000
24	Rosna	700000	1200000
25	Nuridha	800000	1000000
26	Nurmala	800000	1200000
27	Idaryati	600000	1000000
28	Darmawati	8000000	2000000
29	Liza Yusnita	1000000	1500000
30	Nurbaya	800000	1200000
	Total	42050000	52200000

Sumber Data: Survei Lapangan (2018)

Dilihat dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan responden sesudah mengambil pinjaman modal pendapatan sebelumnya sebesar 42.050.000 meningkat pada jumlah rata-rata sebesar 52.200.000 jadi dapat kita lihat adanya kenaikan pendapatan yang signifikan dari total rata-rata. Berarti ada pengaruh yang positif antara pemberian dan SPP terhadap peningkatan anggota.

4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan

4.2.1 Penyajian Data

4.2.1.1 Bagaimana efektivitas program SPP terhadap kesejahteraan hidup anda?

Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut

Bagi responden bantuan dana SPP ini sangat efektif karena sangat membantu mereka dalam hal pemberian modal. Dengan adanya modal spp responden mampu membuka usaha dan mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan menjadi lebih baik. Adapun alasan lain yang responden katakan yaitu bahwa SPP ini sangat mudah baik dalam hal proses pencairan dana dan proses pengembaliannya, pada proses pencairan dana responden diberikan senggang waktu dalam membuka usaha sehingga mampu membayar cicilan pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati (Responden, 2018).

4.2.1.2 Bagaimana perkembangan usaha selama menerima dana SPP ?

Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Perkembangan usaha selama informan mengambil dana spp ini usaha yang dijalankan berlanjar lancar dan maju karena dengan tambahan modal dari SPP peningkatan pendapatan Responden meningkat yang dari sebelumnya rendah menjadi meningkat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari Omset Usaha, bertambahnya barang, variasi barang bagi para pedagang sedangkan bagi petani dan peternak dilihat dari, mampu membeli pupuk, perluasan wilayah, bertambahnya pendapatan. Sedangkan bagi usaha menjahit dapat dilihat dari jumlah barang, bertambahnya alat untuk menjahit. Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif Program SPP itu bagi anggota dimana ada perubahan ketinggian yang lebih baik dari sebelum mengambil SPP (Responden, 2018).

4.1.2.3 Bagaimana status kegiatan kerja anda selama menerima program SPP?

Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Jawaban dari responden banyak yang menjawab bahwa status kegiatan kerja yang mulanya bagi anggota yang belum mampu membuka usaha sebelumnya sehingga mampu membuka usaha (Responden, 2018). Dengan

pinjaman dana tersebut sehingga status kegiatan kerja responden dari tidak bekerja menjadi bekerja, menjadikan mereka menjadi lebih produktif, adapun bagi sebagian responden yang pada dasarnya sudah memiliki usaha dengan pinjaman dana SPP usaha yang dijalankan semakin maju dan bagi beberapa responden yang bekerja menjadi mampu membayar orang dalam membantu dalam menjalankan usahanya dengan begitu jika modal usaha bertambah pendapatan pun juga bertambah.

4.1.2.4 Faktor apa yang mendorong anda mengambil dana SPP?

Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan modal; kekurangan modal adalah hal yang sangat mendasar dimana para anggota ingin membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya sehingga, responden tidak ada cara lain untuk memperoleh modal usaha kecuali dengan mengambil pinjaman dana SPP tersebut. Adapun yang mengatakan mereka kekurangan modal adalah yang menjalankan usaha menjahit, pedagang dan petani.
2. Sebagian besar usaha yang dijalankan antara lain ingin membuka usaha pedagang, petani, peternak, dan menjahit. Jadi dari keseluruhan usaha tadi kenapa banyak yang membuka usaha tersebut dikarenakan tempat

responden tinggal adalah lambaro angan yang mana letak pusat pasar kecamatan darussalam itu di lambaro angan, jadi responden dengan mudah membuka usaha di daerah tersebut seperti berdagang dan menjahit memang sangat tepat, begitu juga dengan peternak dan petani yang mana hasil dari usaha tersebut bisa dibawa ke pasar tersebut untuk dijual.

3. Pengembangan usaha; beberapa responden

sudah memiliki usaha sendiri sebelum mengambil dana SPP seperti responden yang usahanya dagang kue, menjahit, ternak ayam. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan responden yang mendorong mereka mengambil dana SPP yaitu kurangnya modal dan untuk mengembangkan usaha dengan tujuan agar memperoleh pendapatan yang tinggi dan juga usaha yg semakin maju, (wawancara responden 01, 2018). Menurut Responden dana ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan omset usaha, dengan begitu apabila pendapatan sudah tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maka sudah mencapai kesejahteraan yang mana konsep masalah dalam kegiatan SPP ini sudah tercapai bagi responden.

4.2.2 Masalah dalam SPP

Masalah merupakan suatu konsep yang berdasar dari tujuan utama syariat islam yang lebih dikenal dengan Maqashid Syariah,

adapun orientasi utama dari maqashid syariah sebagai perlindungan terhadap lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima hal tersebut merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan, apabila diantara kelima tersebut rusak salah satunya maka akan menimbulkan dampak yang negatif (Pusparini, 2015). Masalah merupakan perbuatan- perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada manusia dalam arti kebaikan dalam memperoleh keuntungan dan ketenangan sedangkan menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi yang mengandung manfaat disebut masalah (Musrofah, 2008). Masalah menurut Izz al Din Abdul al-Salam berarti itu identik dengan al-khair (kebaikan), al-naf (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan).

Sedangkan menurut al-tufi dari segi urf masalah merupakan sebab yang membawa pada kebaikan dan kemanfaatan seperti dalam perniagaan yang merupakan sebab membawa keuntungan, sedangkan dalam arti syar'i masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan syar'i baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Islam mendefinisikan agama tidak hanya pada spiritualitas dan ritualitas akan tetapi agama adalah serangkaian keyakinan, ketentuan, peraturan serta tuntunan moral bagi aspek kehidupan manusia.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik selama proses dan tujuan masih dengan ajaran Islam.

Kegiatan ekonomi dalam islam merupakan suatu aspek dalam mencapai kemuliaan (Falah). Karena bangunan syariah ialah dipresentasikan oleh Masalahah yang ditujukan kepada manusia sebagai hamba allah baik dalam menyangkut kehidupan duniawinya maupun ukhrawinya (Ilyas, 2015).

Jadi dapat dilihat bahwa program SPP ini masih dalam konteks islam karena kgiatannya membawa dampak positif bagi anggotanya. Dari hasil wawancara anggota bahwa program SSP ini sangat membantu dalam hal meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dengan begitu kesejahteraan (Maslahah) anggota SPP tercapai, dalam arti dengan bantuan SPP mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari –hari menjadi lebih baik. memperoleh pendapatan yang layak sehingga dapat mensejahterakan hidup berarti tujuan dari maqashid syariah dalam mewujudkan perlindungan terhadap salah satu dari lima hal yaitu Agama, Jiwa, Akal, keturuna dana harta itu dapat dipenuhi sehingga masalahah un tercapai.

BAB V

PENUTUP

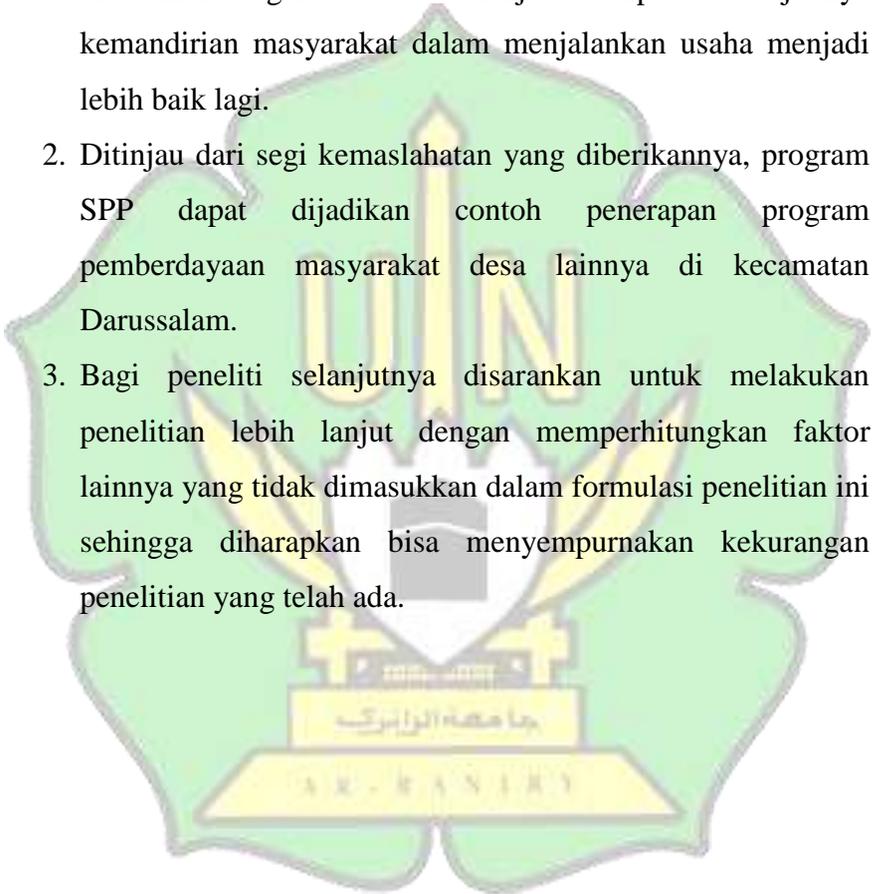
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Dampak Program PNPM terhadap pemberdayaan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditinjau dari Pendekatan masalah sebagai berikut:

1. Bahwa ada pengaruh antara pendapatan responden sesudah mengambil pinjaman modal pendapatan sebelumnya sebesar 42.050.000 meningkat pada jumlah sebesar 52.200.000 jadi dapat kita lihat adanya kenaikan pendapatan selisih pendapatan sebesar 10.150.000 dari total rata-rata. Berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian dan SPP terhadap peningkatan anggota.
2. Pemberian dana SPP terhadap anggota berpengaruh pada perkembangan usaha responden dimana dapat dilihat dari omset usaha, bertambahnya barang, variasi barang dan perluasan wilayah.
3. Adanya pengaruh yang sangat nyata dimana menjadikan anggota yang dasarnya tidak bekerja menjadi bekerja

5.2 Saran

1. Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota SPP di desa Gampong Blang maka disarankan agar terus berlanjut sampai terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menjalankan usaha menjadi lebih baik lagi.
2. Ditinjau dari segi kemaslahatan yang diberikannya, program SPP dapat dijadikan contoh penerapan program pemberdayaan masyarakat desa lainnya di kecamatan Darussalam.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhitungkan faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam formulasi penelitian ini sehingga diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan penelitian yang telah ada.



Daftar Pustaka

- Al-Maqaassary, A. (2013, maret selasa). *Jurnal Penelitian*. Retrieved from www.e-jurnal.com/2013/09/jurnal-penelitian.html.
- Aresta, F. I. (2013). Peranan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bayuurip. 1-3.
- Ariasty. (2015). penerapan masalah mursalah dalam isu kontenporer. *madania* .
- BPS. (2017). *Angka Kemiskinan di ACEH*.
- Christine, M. F., & dkk. (2016). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fargomeli, F. (2014). Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba ALmahera. *Acta Diurna*.
- Harun. (2011). Pemikiran Najmudin AT-thufi Tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Digital Ishaqi*, 18.
- jakarta, T. K. (2008). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Pedesaan* . jakarta.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, N. I. (2013). analisis gender dalam program simpan pinjam untuk kelompok perempuan. *sosiologi pedesaan*.

- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Negeri, D. D. (2008). *Petunjukn Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Tk PNPM Mandiri Perdesaan.
- Nordhaus, S. S. (2011). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Prihatin, A. P. (2015). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
- Purnamasari, N. I. (2015). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional Terhadap Peningkatan Taraf Hidup di Desa Sangatta Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.
- Putra, I. G. (2015). Efektivitas Dampak Program Nasional Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga . 20.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamia*, 25.
- Rachmawati, R. D. (2011). Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Perekonomian Anggota Simpn Pinjam Usaha Ekonomi Produktif . 6.
- Responden, W. (2018, Mai Jumat).
- Responden, W. (2018, Mai Selasa).
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asyatibi Tentang Masalah Mursalah. *Profetika Jurnal Studi Islam* , 9-10.
- Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono, D. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, E. C. (2017, April selasa). *Memacu Infrastruktur Mempercepat Pemerataan Pembangunan*. Retrieved from

setkab.go.id/memacu-infrastruktur-mempercepat-pemerataan-Pembangunan.

wawancara responden 01, 1. (2018, mei jumat). anggota spp.



Lampiran 1

**Pedoman Wawancara Penelitian Analisis Dampak Program
PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam
Perempuan(spp) ditinjau Dari Konsep Masalah**

I. Data pribadi informan

Nama:

Usia:

Usaha yang dijalankan :

Pendidikan terakhir:

Alamat :

Jumlah pembiayaan :

Jumlah pendapatan perbulan:

a. Sebelum:

b. Sesudah :

Tahun pembiayaan :

II. wawancara informan

1. Bagaimana efektifitas mengenai program SPP ini terhadap kesejahteraan anda ?

Jawab :

2. Bagaimana perkembangan usaha selama menerima dana program SPP ?

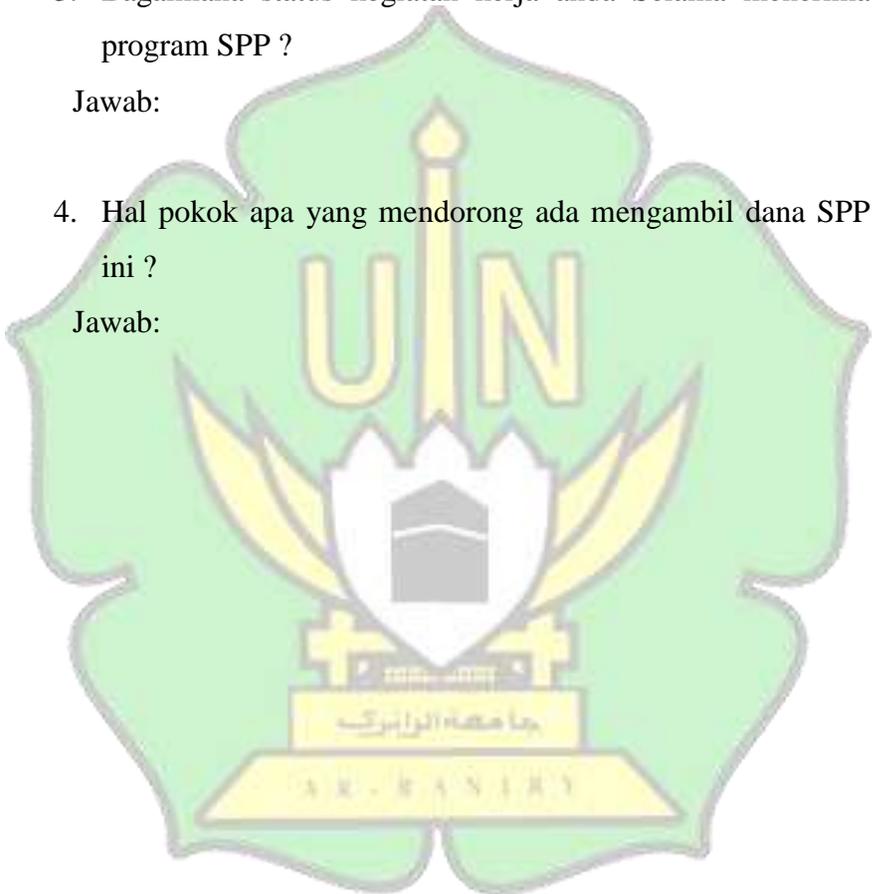
Jawab:

3. Bagaimana status kegiatan kerja anda Selama menerima program SPP ?

Jawab:

4. Hal pokok apa yang mendorong anda mengambil dana SPP ini ?

Jawab:



Lampiran 2

Data Responden

No	Nama	Pendapatan		Usia	pekerjaan	Kegiatan Kerja	jumlah pembiayaan
		Sebelum	Sesudah				
1	Raudhah	1.000.000	3.000.000	53	Pedagang	membayar orang	20.000.000
2	Ade Asniar	-	2.000.000	27	pedagang	bekerja sendiri	2.000.000
3	Nurasnita	500.000	1.000.000	34	Menjahit	bekerja sendiri	2.000.000
4	Nurazizah	150.000	600.000	45	Peternak	bekerja sendiri	5.000.000
5	Rahmi Nurrezeki	1.000.000	2.000.000	24	Pedagang	bekerja sendiri	4.000.000
6	Darmila	1.000.000	2.300.000	33	Pedagang	bekerja sendiri	20.000.000
7	Ainal Mardhiah	700.000	1.000.000	25	Petani	bekerja sendiri	13.000.000
8	Mardiana	1.000.000	2.500.000	41	Petani	bekerja sendiri	7.000.000
9	Irawati	400.000	1.000.000	28	Petani	bekerja sendiri	3.000.000
10	Siti Hajar	500.000	1.000.000	36	Pedagang	bekerja sendiri	3.000.000
11	Idawati	1.000.000	1.500.000	28	Menjahit	bekerja sendiri	8.000.000
12	Misra	5.000.000	10.000.000	34	Pedagang	bekerja sendiri	2.000.000
13	Rosniati	200.000	500.000	47	Peternak	bekerja sendiri	2.500.000
14	Fatimah Syam	1.500.000	3.000.000	48	Pedagang	membayar orang	20.000.000
15	Asnawiyah	700.000	1.000.000	45	Pedagang	bekerja sendiri	5.000.000
16	Asmawati	1.000.000	2.000.000	53	Pedagang	membayar orang	20.000.000
17	Murni	1.000.000	1.200.000	53	petani	bekerja sendiri	3.000.000
18	Rusniati	500.000	1.000.000	48	Peternak	bekerja sendiri	3.000.000
19	Asma	800.000	1.200.000	43	Peternak	bekerja sendiri	3.000.000
20	Syaribanun	800.000	1.000.000	29	Peternak	bekerja sendiri	5.000.000
21	Radhiah	600.000	1.000.000	50	Petani	bekerja sendiri	12.000.000
22	Rahmaniati	1.000.000	2.000.000	28	Pedagang	bekerja sendiri	5.000.000
23	Ummi Kalsum	9.000.000	1.300.000	25	Petani	bekerja sendiri	3.000.000
24	Rosna	700.000	1.200.000	52	petani	bekerja sendiri	15.000.000
25	Nuridha	800.000	1.000.000	47	Peternak	bekerja sendiri	3.000.000
26	Nurmala	800.000	1.200.000	40	Pedagang	bekerja sendiri	1.000.000
27	Idaryati	600.000	1.000.000	34	Pedagang	bekerja sendiri	20.000.000
28	Darmawati	8.000.000	2.000.000	50	Peternak	bekerja sendiri	11.000.000
29	Liza Yusnita	1.000.000	1.500.000	35	Peternak	bekerja sendiri	8.000.000
30	Nurbaya	800.000	1.200.000	43	Peternak	bekerja sendiri	1.500.000

BIODATA

Nama : Hayatul Khusna
Tempat/Tgl. Lahir : Gampong Blang, 1 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Jl Lambaro Angan Desa Gampong Blang
Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar.
Telp/HP : 0853-5875-1257
Email : Hayatul.khusna54@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2001-2002 : TK Bunga Bangsa
2002-2008 : SD Lambaro Angan
2008-1011 : MTsN Tungkop
2011-2014 : MAN 4 Aceh Besar
2014-2018 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

BIODATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ramli
Pekerjaan Ayah : Tani
Nama Ibu : Murni
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat Orang Tua : Jl Lambaro Angan Desa Gampong Blang
Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Hayatul Khusna